

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Banjir seakan-akan menjadi keseharian bagi penduduk yang tinggal di DKI Jakarta. Bahkan dapat dikatakan menjadi bagian dari sejarah dari Ibukota kita. Banjir merupakan sebuah fenomena alam yang sering kali terjadi di wilayah yang dilalui oleh aliran Sungai. Menurut KBBI, Banjir berasal dari kata banjir, yang memiliki arti sebagai sebuah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena adanya volume air yang meningkat. Secara sederhana banjir dapat dijelaskan sebagai situasi di mana air meluap dan menutupi luas permukaan tanah di suatu wilayah tertentu, dalam konteks yang lebih luas, banjir dapat dianggap sebagai bagian dari siklus hidrologi, yang mencakup pergerakan air di permukaan bumi menuju laut, dalam siklus hidrologi ini, kita dapat mengamati bahwa jumlah air yang mengalir di permukaan bumi dipengaruhi secara signifikan oleh curah hujan dan tingkat penyerapan air oleh tanah¹.

Berdasarkan jenisnya Banjir dapat dikategorikan ke dalam beberapa Jenis, yakni Banjir Luapan Sungai yang disebabkan ketika debit sungai meluap melewati batas normal, Banjir Luapan Laut yang disebabkan oleh naiknya permukaan air laut, Banjir Genangan yang disebabkan ketika air menggenangi daratan rendah dan Banjir Bandang, Banjir dengan kekuatan yang sangat besar dan mendadak, seringkali disertai longsor². Banjir di Jakarta dapat dikategorikan dalam tiga jenis, yakni banjir akibat hujan lokal (torrential rain flood), banjir akibat luapan sungai (fluvial flood), serta banjir akibat pasang laut (coastal flood)³

Banjir menjadi salah satu bencana alam yang selalu menghantui Jakarta, banjir sudah terjadi jauh semenjak kota ini masih dikenal sebagai Sunda Kelapa, di era-Tarumanagara, pada masa Raja Purnawarman, daerah yang menjadi cikal bakal Jakarta sendiri sudah tercatat pernah terendam banjir. Bahkan di masa Kolonial, banjir sudah menjadi problematika besar bagi para Gubernur Jendral Belanda yang berkuasa di Jakarta, kesalahan pemerintah Kolonial yang memutuskan untuk mendirikan pusat pemerintahan Koloni mereka diatas rawa-rawa

¹ "Banjir," *KBBI Daring*, tanpa tahun, diakses 5 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/banjir>.

² BPBD Provinsi Jawa Timur, "Banjir: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya," 19 Oktober 2023, diakses 5 Mei 2025, <https://web.bpbddjatimprov.go.id/2023/10/19/banjir-pengertian-penyebab-dan-dampaknya/>.

³ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), "Peneliti BRIN Ungkap Faktor Penyebab Banjir di Jabodetabek dan Solusinya," 7 Maret 2025, diakses 5 Mei 2025, <https://www.brin.go.id/news/122493/peneliti-brin-ungkap-faktor-penyebab-banjir-di-jabodetabek-dan-solusinya>.

didataran rendah menyebabkan permasalahan sendiri bagi pemerintah Kolonial kala itu, tercatat banjir besar pernah beberapa kali melanda Jakarta di Era Kolonial mulai dari tahun 1621, 1654, 1872, 1893, 1909, 1918 hingga 1932.⁴

Tercatat beberapa daerah di Jakarta rawan sekali terendam banjir, terutama daerah-daerah yang berdekatan dengan 13 sungai yang ada di Jakarta yang juga disebut sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS), contohnya Daerah Aliran Sungai Ciliwung yang merupakan sungai dengan kontribusi terbesar terhadap potensi banjir di wilayah DKI Jakarta, seperti Kecamatan Tebet, Jatinegara, Matraman, Pasar Rebo dan Johar Baru, sedangkan di daerah Utara Jakarta. Ancaman penurunan muka tanah dan meningkatnya air laut menjadi penyumbang besar banjir Rob yang kerap kali melanda wilayah Tanjung Priok, Penjaringan, Ancol, Marunda, Cilincing, Muara Angke dan Kamal⁵.

Kota Jakarta, semenjak masa Kolonial ketika masih dikenal dengan nama Batavia mengalami transformasi besar, dibangunnya kota Jakarta sebagai kota bagi para pejabat Belanda dan dijadikannya Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan lagi Industri dan pertanian serta perkebunan Hindia Belanda menyebabkan Kota Batavia menjadi magnet bagi para pendatang baik mereka yang datang dengan keinginan sendiri karena mencari kesempatan bekerja di daerah Jakarta dan sekitarnya maupun para buruh kuli yang datang dengan paksaan untuk bekerja di perkebunan-perkebunan di sekitar Jakarta, membuat kota ini mengalami penambahan populasi yang signifikan.

Pasca-Kemerdekaan 1945 status Jakarta yang kembali berubah dari pusat pemerintahan Koloni menjadi Pusat Pemerintahan dan Ekonomi negara Merdeka NKRI menyebabkan magnet Kota Jakarta seakan-akan semakin menguat, hal ini mentransformasi Jakarta menjadi kota urban yang dinamis namun disisi lain menyebabkan permasalahan di Jakarta bertambah besar, kedatangan para transmigran menyebabkan lahirnya daerah-daerah kumuh di Jakarta, memperburuk dampak dari turunya hujan baik di Jakarta maupun disekitarnya, memperparah Banjir di Jakarta dari tahun ke tahun, belum lagi kegagalan pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan perencanaan tata kota yang berkelanjutan serta ledakan populasi yang dimulai semenjak tahun 60-an membuat tata kota dan perencanaan Kota Jakarta menjadi kacau menghilangkan berbagai zona atau wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah direncanakan sebagai daerah Hijau atau serapan hilang menjadi wilayah-wilayah permukiman kumuh baru.

⁴ , H. M. Zaenuddin, *Banjir Jakarta: dari zaman Jenderal JP Coen (1621) sampai Gubernur Jokowi* (Jakarta: Change Publishing, 2013), hlm. 13

⁵ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, "Data Daerah Rawan Banjir DKI Jakarta," *Katalog Data Indonesia*, diakses 5 Mei 2026, <https://katalog.data.go.id/dataset/data-daerah-rawan-banjir-dki-jakarta1>

belum lagi kegagalan pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan akses air bersih dan memastikan akses air bersih kepada Masyarakat penduduk DKI Jakarta, telah membuat Masyarakat DKI Jakarta beralih menggunakan pompa air pribadi sebagai alternatif mereka untuk memenuhi kebutuhan air bersih, hal ini menyebabkan adanya penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh hilangnya air tanah untuk konsumsi Masyarakat Jakarta. Hal ini memperburuk siklus Banjir yang terus terjadi di Jakarta dan memperparah kerusakan serta fatalitas Banjir yang ada.

Berbagai problematika inilah yang dihadapi oleh Gubernur-Gubernur DKI Jakarta dalam usaha mereka menghadapi Banjir di Ibukota, komplikasi hal-hal tadi beserta lokasi dan Sejarah Kota Jakarta menciptakan situasi dan kondisi dimana Banjir tidak hanya menjadi bagian dari Sejarah kota Jakarta namun seakan-akan menjadi hal yang lumrah yang harus dihadapi oleh Masyarakat Jakarta setidaknya setiap setahun atau beberapa tahun sekali. Dalam sejarah Jakarta sudah dilakukan penanganan Banjir, semenjak era Kerajaan Tarumanagara, kala itu Raja Purnawarman pernah membuat proyek penggalian kali Chandrabhaga (Bekasi) serta Gomati (Tangerang) sepanjang 24 Kilometer untuk mengatasi banjir⁶. Di masa kolonial Belanda, penanganan banjir dilakukan pada tahun 1600-an disaat Gubernur Jendral Belanda Jan Pieterszoon, yang menginstruksikan dibentuknya sejumlah kanal-kanal di Jakarta, menggunakan perencanaan tata-kota seperti yang ada di kota-kota Belanda⁷. Pemerintah Kolonial Belanda kala itu tidak hanya berharap pembangunan kanal-kanal tersebut mampu mencegah terjadinya kembali banjir namun juga dapat digunakan sebagai infrastruktur sarana transportasi sungai di Jakarta, namun sayangnya kanal-kanal tersebut belum cukup untuk mencegah banjir di Jakarta, sepanjang masa Kolonial Belanda Jakarta masih akan terus digempur banjir. Banjir besar pada tahun 1918, pada masa Gubernur Jendral VOC Johan Paul Van Limburg Stirum, melahirkan respon pemerintah Hindia Belanda lewat perencanaan dan instruksi dibentuknya sistem Kanal Banjir besar di Barat Jakarta, yang membentang dari Pintu Air Manggarai hingga Muara Angke. Kanal ini sekarang kita kenal sebagai Banjir Kanal Barat. Masalah banjir terus berlanjut bahkan hingga di Era Kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi pemerintah walikota dan kemudian Provinsi DKI Jakarta.

Di masa Indonesia Merdeka, pada tahun 1960-an, Ali Sadikin Gubernur Jakarta, menghadapi Jakarta sebagai kota metropolis dengan datangnya migran dalam jumlah yang

⁶ Zaenuddin, *Banjir Jakarta*, hlm.11.

⁷ Heru Mulyanto, "PERKEMBANGAN KANAL OUD BATAVIA ABAD XVII–XX: TINJAUAN SEJARAH PERKOTAAN," *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 12, no. 3 (2022): 2.

besar dan membuat populasi Jakarta tidak terkendali, serta menurunnya lahan hijau, hal ini membuat Jakarta menjadi semakin rentan terhadap banjir.

Pada tahun 1965 Gubernur Ali Sadikin menginstruksikan dibentuknya Komando Proyek Pencegahan Banjir (KOPRO) yang kemudian namanya diganti menjadi Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya pada tahun 1972. Pemerintah DKI Jakarta pada saat itu bekerja sama dengan pihak Netherlands Engineering Consultants (NEDECO). Kala itu Gubernur Ali Sadikin menyoroti rusaknya tata kota Jakarta yang juga sebagai dampak dari tidak terkontrolnya populasi, dimana daerah Hijau atau resapan berubah menjadi bangunan perumahan, Gubernur Ali Sadikin juga menyoroti kondisi drainase Jakarta yang buruk dan menyebutkan bahwa banjir di Jakarta tidak akan dapat dihindari apabila Jakarta tidak membangun saluran drainase yang sempurna.

Instansi ini memiliki tugas utama untuk mengatasi banjir di Jakarta, melalui pembangunan waduk atau cekungan, rehabilitasi sungai, pembangunan polder dan pengalihan sungai serta perbaikan sanitasi, khususnya pembuangan limbah padat yang kala itu dianggap memerlukan perbaikan sistem secara keseluruhan⁸. Masalah pendatang yang memperburuk kondisi banjir di Jakarta juga menjadi sorotan kala itu.

Pada tahun 1973, Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, dengan dukungan teknis dari perusahaan Belanda NEDECO, menyiapkan rencana induk untuk drainase dan pengendalian banjir di Jakarta. Rencana induk ini meskipun berfokus pada di DKI Jakarta juga berusaha untuk membentuk perencanaan yang meliputi daerah sekitar Jakarta dan mengusulkan perluasan Kanal Banjir Barat yang pertama kali dibangun pada tahun 1924, untuk menghubungkan Sungai Grogol, Sekretaris, Angke ke Kali Ciliwung, Cideng dan Krukut melalui sedotan-sedotan kali yang sebelumnya telah terhubung ke kanal yang dibangun pada tahun 1924. Pada perencanaan ini pula, pertama kali rencana awal dari Pembangunan Kanal Baru, yang nantinya akan menjadi Kanal Banjir Timur muncul⁹.

Pada masa Gubernur Tjokropranolo pada tahun 1979 Jakarta Kembali di hantam banjir besar, banjir ini menyebabkan Pembangunan kanal banjir baru menjadi mendesak, sehingga akhirnya rencana perpanjangan jalur banjir atau sedotan bagian barat dibatalkan dan digantikan dengan jalur banjir baru, yaitu saluran cengkareng.

⁸ Christopher Silver, *Planning the Megacity...* (London: Routledge, 2007), hlm. 112

⁹ Nedeco, *Masterplan for Drainage and Flood Control of Jakarta, Jakarta Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumberdaya Air, 1973).

Pada masa Gubernur Suprpto, rencana penanganan banjir dilakukan dengan mengikuti Master Plan Jakarta 1985-2005, yang berisi tentang pengaturan banjir dan drainase serta besaran LTH (Lahan Terbuka Hijau) untuk wilayah DKI Jakarta, berdasarkan Master Plan ini sistem pengaturan banjir dibagi ke dalam tiga bagian, bagian tengah, timur dan barat. Master Plan ini nantinya akan terus menjadi panduan dalam penanganan banjir di Jakarta¹⁰.

Pada masa Gubernur Wiyogo Atmodarminto, usaha penanganan banjir dilakukan lewat pembangunan sedotan-sedotan untuk menghubungkan kali-kali di Jakarta dengan kanal yang sudah ada, usaha lain seperti pengerukan, pembuatan waduk penampung, instalasi pompa pembuangan hingga normalisasi kali dengan penertiban bangunan liar dilakukan.

Pada tahun 1996, dimasa pemerintahan Gubernur Surjadi Sudirja bersama dengan Kementrian Pekerjaan Umum sebuah rencana baru muncul, untuk membangun pantai utara Jakarta dan memasukannya dalam usaha pencegahan banjir di Jakarta, melalui reklamasi lahan besar-besaran setelah terjadinya penurunan permukaan tanah di Jakarta . Dilakukan usaha penanganan banjir secara lebih terencana, asumsi dasar dari rencana induk pengendalian banjir tahun 1997 adalah bahwa sistem tersebut diperlukan untuk “mengurangi beban” pada ciliwung, karena ciliwung melintasi Jakarta Pusat dan membahayakan pusat-pusat pemerintahan dan bisnis serta lingkungan perumahan elit Jakarta. Rencana tersebut menyarankan pembangunan tanggul dan perbaikan sungai di sepanjang sungai di daerah pinggiran kota yang baru mengalami urbanisasi. Mereka juga mengusulkan agar jalur banjir bagian timur yang sangat dibutuhkan harus didesain ulang dengan struktur beton yang lebih sempit dan tembok tinggi untuk mengurangi jumlah ruang yang dibutuhkan dan dengan demikian mengurangi pembebasan lahan, yang merupakan masalah ekonomi dan politik dengan tetap mempertahankan volume aliran yang sama.

Semenjak akhir 90-an dan awal 2000, Banjir semakin sering melanda Jakarta dengan intensitas yang juga meningkat. Pada masa Gubernur Sutiyoso (1997-2007), terjadi banjir besar pada tahun 2002. Hal ini membuat pemerintah DKI Jakarta mengevaluasi Kembali permasalahan yang ada dalam implementasi Master Plan Jakarta, yakni dibutuhkannya koordinasi yang baik antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Jakarta, hal ini tercapai dengan dibentuknya wilayah Megapolitan

¹⁰ Tri Nugraha Adikesuma, “Permasalahan Pelestarian Sumber Daya Air Jakarta,” *Widyakala Journal: Journal of Pembangunan Jaya University* 2, no. 1 (2015): 87.

Jabodetabek, Banjir besar 2002 juga menyebabkan pemerintah mengebut pembangunan Banjir Kanal Barat (BKT) yang sempat terhenti karena krisis moneter di tahun 98.

Pada Era Gubernur Fauzi Bowo, Jakarta kembali mengalami banjir hebat pada tahun 2007, Pemerintah DKI Jakarta merespon hal ini dengan melakukan pengerukan Sungai, penataan pembangunan waduk dan normalisasi Sungai, progress pembangunan Banjir Kanal Timur juga berkembang pesat di Era Fauzi Bowo.

Penanganan banjir yang dilakukan berbagai Gubernur diatas, ternyata tidak berhasil menuntaskan masalah banjir, banjir musiman yang menghantam Jakarta dari tahun ke tahun tidaklah mereda, namun semakin sering dengan intensitas yang semakin besar dan terus menjadi tantangan bagi gubernur-gubernur selanjutnya yang melanjutkan ikhtiar penanganan banjir di DKI Jakarta.

Berdasarkan Penjelasan yang telah di uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang penanganan Penanganan Banjir Jakarta Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo hingga Djarot Saiful Hidayat 2012-2017. Penanganan Banjir di DKI Jakarta di masa ini tidaklah dapat di pisahkan dari kursi Gubernur yang menjadi batu loncatan bagi Gubernur Joko Widodo sebagai Presiden RI, serta kontroversi yang menyelimuti dalam penanganan banjir di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa terdapat banyak penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan mengenai kebijakan dan penanganan banjir di Jakarta, contohnya seperti penelitian yang ditulis oleh Restu Gunawan dalam “Gagalnya Sistem Kanal”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk berfokus pada pembahasan problematika-problematika yang memperburuk penanganan banjir yang sudah muncul dimasa-masa sebelumnya seperti besarnya jumlah penduduk ,tata kota dan masalah daerah hijau. Juga tantangan baru yang muncul di masa depan seperti perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut yang harus dihadapi oleh Gubernur-Gubernur yang menjabat sepanjang tahun 2012-2017, serta mencakup atau berfokus pada penanganan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur-Gubernur terkait dalam usaha mengatasi permasalahan banjir, Assesment mengenai efektivitas dari kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur-Gubernur yang menjabat sepanjang tahun 2012-2017. Yang nantinya juga akan dihadapi oleh gubernur-gubernur selanjutnya.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Informasi yang telah diuraikan didalam latar belakang masalah, penelitian ini memiliki pembatasan yang mencakup dua aspek utama ; pembatasan spasial (ruang) dan pembatasan temporal (Waktu). Pembatasan Spasial dalam penelitian ini adalah Jakarta, mengingat fokus penelitian adalah kebijakan-kebijakan pengendalian dan pencegahan banjir di Jakarta. Sementara itu, Batasan waktu (2012-2017). Batas awal penelitian ini adalah tahun 2012 tahun dimana Gubernur Joko Widodo pertama kali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Djarot Saeiful Hidayat pada tahun 2017 ketika beliau digantikan oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Raysid Baswedan. Peneliti juga akan mencoba membatasi pembahasan dalam hubungannya faktor-faktor atau tantangan yang dihadapi oleh Gubernur-Gubernur DKI Jakarta di tahun 2012-2017 dalam menghadapi banjir di DKI Jakarta dalam hal yang berhubungan dengan Geografis atau Lokasi dari DKI Jakarta, perkembangan demografi dan populasi DKI Jakarta, Tata Kota DKI Jakarta beserta perubahan Iklim yang mempengaruhi dan berkontribusi dalam memperburuk situasi banjir di DKI Jakarta.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- (a) Tantangan apa yang dihadapi oleh Gubernur Joko Widodo, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Djarot Saiful Hidayat dalam menghadapi Banjir di DKI Jakarta ?
- (b) Bagaimana kebijakan pengendalian banjir di Provinsi DKI Jakarta semasa Gubernur Gubernur Joko Widodo, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Djarot Saiful Hidayat ?.
- (c) Banjir-Banjir apa saja yang dihadapi Jakarta pada masa Gubernur Joko Widodo, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Djarot Saiful Hidayat ?.
- (d) Bagaimana Efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semasa Gubernur Joko Widodo, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Djarot Saiful Hidayat ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (a) Untuk mengetahui Tantangan-tantangan yang harus di hadapi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (2012-2017).
- (b) Untuk mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semasa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (2012-2017) dalam menangani banjir di Jakarta.
- (c) Untuk mengetahui banjir-banjir besar signifikan yang harus di hadapi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
- (d) Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (2012-2017).

2. Kegunaan

2.1 Kegunaan Akademik

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi potongan-potongan sejarah mengenai sejarah lokal DKI Jakarta.
- b) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai usaha pengendalian Banjir di DKI Jakarta

2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini sebagai bahan untuk pengayaan dalam pembelajaran dan perkuliahan baik tingkat sekolah maupun universitas dan juga merupakan syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Strata-1 (S1) Pendidikan pada program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah atau historis dan disajikan menggunakan model deskriptif naratif. Metode historis yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti prosedur dan kaidah- kaidah yang berlaku

dalam penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: Pemilihan Topik, Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi.

Pada tahap pertama, pemilihan topik sangat berkaitan dengan ketertarikan penulis terhadap problematika penanganan Banjir dan penyebabnya yang dihadapi oleh DKI Jakarta, serta ketertarikan penulis terhadap Sejarah Jakarta secara luas. Kedua, tahap Heuristik atau pengumpulan sumber. Pada tahap ini, sumber yang digunakan untuk penelitian Sejarah adalah sumber primer yang berupa wawancara dengan tokoh atau saksi, artefak, dan dokumen se-zaman, dokumen-dokumen terkait perencanaan penanganan dan penanggulangan banjir di era terkait serta dokumen-dokumen dari dinas terkait semisal PEMDA DKI, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Kesehatan dan Dinas-Dinas terkait lainnya, maupun dokumen-dokumen dari pihak terkait lainnya seperti kementerian terkait contohnya kementerian PUPR maupun Perusahaan terkait seperti NEDECO. Selain itu juga ada sumber sekunder yang berupa buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan topik.

2. Bahan Sumber

Sumber penelitian diperoleh melalui berbagai jenis sumber, seperti buku, dokumen, arsip, film, serta surat kabar yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas penanganan banjir di Jakarta, kebijakan para gubernur DKI Jakarta, maupun sejarah perkembangan Kota Jakarta. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperoleh landasan konseptual, memperkuat kajian historiografi, serta membandingkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta dinas-dinas terkait, kementerian yang berhubungan dengan penanganan banjir, serta dokumen perencanaan yang disusun oleh lembaga atau konsultan, seperti NEDECO, Nippon Koei (NADECO), Japan International Cooperation Agency (JICA), dan berbagai dokumen resmi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan arsip, laporan, peta, serta dokumen kebijakan yang diterbitkan pada periode penelitian sebagai dasar untuk merekonstruksi perkembangan kebijakan penanganan banjir di Jakarta.